

Kerjasama Ekonomi di antara Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara*

Hadi SOESASTRO

PENDAHULUAN

Bila digabungkan, jumlah penduduk dari 10 negara di Asia Tenggara pada tahun 1981 mencapai 363 juta.¹ Ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara terbesar (41% dari jumlah keseluruhan) dan Brunei Darussalam yang baru saja merdeka merupakan negara yang terkecil (kurang dari 0,1%). Tetapi Brunei merupakan negara terkaya di kawasan ini dengan GNP per kapita lebih dari US\$ 20.000, suatu jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat di negara-negara lainnya di kawasan ini, yaitu antara kurang dari US\$ 100 dan US\$ 6.000 (Singapura) pada tahun 1981.

Perbedaan-perbedaan di antara kesepuluh negara itu dapat ditemui dalam banyak hal, tetapi kesamaan-kesamaan juga ada di antara beberapa dari mereka. Perbedaan-perbedaan dalam struktur ekonomi -- dan karenanya, komplementaritas antara ekonomi-ekonomi -- tampaknya terlalu ditonjolkan sebagai persyaratan bagi kerjasama ekonomi. Hal ini mungkin merupakan faktor yang penting jika sasaran utamanya adalah peningkatan perdagangan intra-regional. Di lain pihak, juga dapat dijumpai bahwa persamaan-persamaan di antara negara-negara dapat menjadi pendorong bagi penggabungan kekuatan (*pooling of resources*) secara terorganisasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang tertentu. Faktor-faktor ekonomi apa yang penting untuk mendorong kerjasama ekonomi tidak dapat dinyatakan secara *a priori*. Memang, kerjasama ekonomi dapat mengambil banyak bentuk.

*Terjemahan makalah "Economic Cooperation among Countries in Southeast Asia," yang disampaikan pada Seminar Indonesia-Vietnam di Hanoi, 25-26 Pebruari 1984. Diterjemahkan oleh Endi RUKMO.

¹Sepuluh negara itu adalah Brunei, Birma, Indonesia, Kampuchea, Laos, Malaysia, Pilipina, Singapura, Muangthai dan Vietnam.

Sejak tahun 1967, lima negara Asia Tenggara bersatu dalam suatu kelompok kerjasama ekonomi yang sekarang telah begitu terkenal dengan sebutan ASEAN. Anggota keenam, Brunei, baru saja bergabung dengan organisasi itu. Apa pun yang menjadi alasan terbentuknya ASEAN, ada kemauan politik dari negara-negara itu dan komitmen untuk itu semakin diperkuat karena ASEAN lambat-laun telah menjadi suatu kenyataan hidup dan alam pikiran di setiap negara anggotanya.

Dari berbagai program kerjasama ekonomi yang telah diperkenalkan ASEAN selama ini beberapa telah menunjukkan hasil yang mengagumkan, tetapi lainnya hanya tinggal di atas kertas belaka. Sementara menyadari akan adanya beberapa kesulitan yang biasanya dihadapi di dalam suatu kerjasama ekonomi regional, khususnya di antara negara-negara sedang berkembang -- seperti ditunjukkan oleh kegagalan kerjasama di antara negara-negara Amerika Latin -- negara-negara ASEAN tetap yakin akan keuntungan yang dapat diperoleh dari organisasi itu di masa yang akan datang.

Tulisan ini mencoba untuk menyoroti beberapa isu umum mengenai kerjasama ekonomi regional di Kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di antara negara-negara sedang berkembang pada umumnya.

MENGENAI KERJASAMA EKONOMI

Ada banyak alasan mengapa beberapa negara ingin bergabung dalam suatu bentuk kerjasama ekonomi. Pendorong untuk kerjasama itu mungkin saja bersifat ekonomi semata-mata, tetapi dapat pula didasarkan pada motivasi-motivasi politik. Sering orang melontarkan pertanyaan seperti berikut ini: "Dapatkah kerjasama ekonomi meningkatkan solidaritas politik?" Suatu pertanyaan yang ada kaitannya dengan pertanyaan ini juga telah diajukan: "Apakah kerjasama ekonomi dapat dilangsungkan tanpa adanya solidaritas politik?"

Kedua pertanyaan di atas tampaknya terlalu bersifat akademis. Oleh karenanya, marilah kita sebentar melihat pengalaman-pengalaman ASEAN. Sejak semula ASEAN telah menghindari membuat suatu "cetak-biru" yang ambisius. Sebagai gantinya, kelima negara anggota ASEAN sepakat untuk merencanakan sasaran-sasaran yang sederhana, didefinisikan dalam bentuk yang sangat umum, sehingga tidak membuat kaku organisasi itu. Keluwesan merupakan sifat organisasi yang dijunjung tinggi. Sifat lainnya adalah pragmatisme. Para pemimpin ASEAN pada tahun 1967 sadar sepenuhnya akan batas-batas dari kerjasama itu. Integrasi ekonomi tidak pernah menjadi sasaran. Mereka juga tidak pernah mempertimbangkan beraneka cara atau tahapan kerjasama seperti yang dianjurkan oleh buku teks ekonomi.

Apa yang telah ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN terbukti merupakan jalan yang paling realistis. Mereka telah menekankan perlunya keluwesan organisasi dan pendekatan yang pragmatis dalam menangani kerjasama ekonomi, karena mereka percaya -- seperti terbukti kebenarannya -- bahwa hanya bila diatur dengan cara seperti itu kerjasama ekonomi di antara kelima negara ASEAN dapat bermanfaat. Keyakinan ini ternyata tidak tergoyahkan oleh berbagai kritik baik dari dalam maupun dari luar ASEAN yang tidak sabar melihat kemajuan perkembangan ASEAN.

Karena sifatnya yang pragmatis, pendekatan-pendekatan ASEAN dalam kerjasama ekonomi pada umumnya tidak ideologis. Penggabungan kekuatan, seperti yang dimanifestasikan dalam hubungan dengan pihak-pihak "ketiga" -- yaitu dengan partner dagang utama ASEAN seperti Jepang, Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan negara-negara lainnya -- didasarkan pada kebutuhan. Dialog-dialog ASEAN, yang dianggap sebagai kegiatan ASEAN yang paling berhasil, telah membawa hasil yang menguntungkan ASEAN. Meskipun dialog-dialog ini mengandung sifat Utara-Selatan yang diakui oleh kedua belah pihak, namun ASEAN tetap mempertahankan sikapnya yang pragmatis.

Dialog Utara-Selatan seperti yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN dalam kerangka regional telah membawa lebih banyak hasil yang konkrit dibandingkan dengan dalam perundingan-perundingan tingkat global yang mengalami jalan buntu. Meskipun demikian, ASEAN tetap mempertahankan peranan aktifnya di banyak forum global guna ikut memecahkan masalah-masalah pembangunan dunia, khususnya Dunia Ketiga. Di dalam dialog Utara-Selatan, ASEAN mengambil posisi moderat, dan secara aktif mendukung ide kerjasama Selatan-Selatan yang bermula dari Gerakan Non-Blok. Sehubungan dengan kerjasama Selatan-Selatan itu, ASEAN mengambil sikap yang tegas: berdasarkan pengalamannya di dalam meningkatkan kerjasama di antara negara-negara tetangga yang sedang berkembang, ASEAN melihat pentingnya memperkuat ASEAN terlebih dahulu untuk bisa secara serius meningkatkan kerjasama di antara negara-negara sedang berkembang (Economic Cooperation among Developing Countries - ECDC) dan kerjasama teknik di antara negara-negara sedang berkembang (Technical Cooperation among Developing Countries - TCDC), seperti yang digariskan oleh "Arusha Programme for Collective Self-Reliance and Framework for Negotiations."

Seperti yang telah dianjurkan, "realisme menuntut bahwa kerjasama (Selatan-Selatan) pada tahap pertama, dilaksanakan antara sejumlah kecil negara untuk mencapai sasaran yang disepakati bersama, dan jelas tidak secara global."¹ Secara individu, setiap negara ASEAN telah meningkatkan

¹Lihat, Mahbub Ul-Haq, "Beyond the Slogan of South-South Cooperation," dalam *World Development*, Vol. 8, No. 10 (Oktober 1980), hal. 751.

usaha-usaha untuk berpartisipasi dalam beberapa program ECDC dan TCDC. Sebagai contoh, Indonesia telah meningkatkan bantuan tekniknya di bawah TCDC sejak tahun 1981 kepada sejumlah negara seperti Bangladesh, Papua Nugini, dan Tanzania, mencakup berbagai bidang, termasuk proyek-proyek perumahan rakyat, pembangunan pertanian, pembangunan telekomunikasi, dan keluarga berencana. Tetapi kiranya pada waktunya dapat diharapkan bahwa negara-negara ASEAN sebagai suatu kelompok akan bekerjasama meningkatkan ECDC dan TCDC.

Setiap usaha kerjasama tersebut kiranya akan memberikan prioritas pada kerjasama dengan negara-negara tetangga ASEAN sendiri. Ini dapat saja ditunjukan ke negara-negara di Kawasan Asia Selatan atau negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, tetapi bisa juga difokuskan di Kawasan Asia Tenggara sendiri. Beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan kerjasama antar-regional, seperti antara Sekretariat ASEAN dan Dewan Ekonomi Pasifik Selatan (South Pacific Economic Council - SPEC). Kerjasama antara ASEAN dan Kawasan Asia Selatan akan tergantung pada kemajuan ketujuh negara Asia Selatan dalam memperkuat SARF (South Asia Regional Forum), yang didirikan pada tahun 1981. Kecenderungan di banyak wilayah di dunia sekarang ini memang ke arah regionalisme, dan ECDC dan TCDC mendukung perkembangan ini.

Karena ASEAN hanya terdiri dari 6 negara dari 10 negara di Asia Tenggara, masalah yang muncul adalah mengenai kerangka kerjasama melalui mana kerjasama ekonomi antara ke-10 negara itu dapat ditingkatkan. Dua kemungkinan telah diusulkan dari waktu ke waktu. *Pertama*, adalah kemungkinan untuk memperluas keanggotaan ASEAN yang pada akhirnya mencakup ke-10 negara di Asia Tenggara itu. Masuknya Brunei baru-baru ini ke dalam ASEAN dapat dilihat sebagai akibat yang wajar dan logis dari kemerdekaannya. Tetapi sistem manajemen ekonomi yang dipraktekkan oleh negara itu telah mempermudah negara itu bergabung dengan ASEAN. Di sini terletak perbedaan dengan ke-4 negara lainnya di Asia Tenggara. Birma, meskipun setahap demi setahap membuka sistem ekonominya dari isolasi yang telah berlangsung sekitar satu dasawarsa, pada dasarnya tetap melanjutkan kebijaksanaan ekonomi tertutup di mana alokasi sumber-sumber dalam negeri tetap tidak terpengaruh oleh perdagangan internasional. Vietnam dan Laos telah memilih sistem ekonomi yang berbeda yang dalam banyak hal membutuhkan jawaban-jawaban yang berbeda dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang juga berbeda dari apa yang dihadapi di negara-negara ASEAN. Walaupun demikian, di waktu yang lalu ASEAN pernah mengambil inisiatif untuk mengundang negara-negara Indocina dan Birma untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ASEAN sebagai peninjau.

Kemungkinan kedua ditujukan kepada suatu hubungan kerjasama antara ASEAN dan suatu asosiasi ekonomi sub-regional yang mungkin muncul di antara negara-negara Indocina pada waktu-waktu mendatang. Birma dapat memilih untuk bergabung dalam salah satu dari asosiasi-asosiasi itu (atau keduanya). Pandangan ini mendasarkan pada proposisi bahwa suatu kerjasama ekonomi regional dapat berjalan hanya di antara negara-negara yang menganut sistem ekonomi yang sama, tetapi pada waktu yang sama membuka kemungkinan bagi peningkatan hubungan kerjasama di antara asosiasi-asosiasi yang berbeda itu.

Kemungkinan mana pun yang dipilih, tidak sedikit orang mempersoalkan masalah hubungan antara kerjasama ekonomi dan solidaritas politik. Sejumlah orang bahkan melihat ruang lingkup yang sangat terbatas di Asia Tenggara untuk mengembangkan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan di atas. ASEAN di pihaknya berkepentingan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperkuat solidaritas politik di antara anggota-anggotanya maupun di antara semua negara di Kawasan Asia Tenggara. Tetapi pendekatan-pendekatannya yang pragmatis mengamanatkan bahwa prioritas diberikan kepada apa-apa yang sudah ada secara pasti. ASEAN tidak mempromosikan atau mengusahakan persetujuan-persetujuan untuk perluasan organisasi tersebut demi perluasan itu sendiri. Permintaan Srilangka merupakan suatu kasus yang bisa dijadikan contoh.

Walaupun tidak terdapat suatu pola kerjasama ekonomi regional, tidak dapat disangkal, bahwa hubungan ekonomi bilateral antara negara-negara Asia Tenggara bukan tidak berarti. Masih terbuka untuk spekulasi apakah hubungan semacam itu mungkin dapat berkembang ke arah pola kerjasama yang lebih terstruktur di masa yang akan datang. Marilah kita menilai hubungan perdagangan di antara ke-10 negara Asia Tenggara.

HUBUNGAN EKONOMI DI ANTARA NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

Perdagangan merupakan manifestasi yang paling menyolok dari hubungan ekonomi antar negara. Meskipun perdagangan *per se* seharusnya tidak dilihat sebagai sasaran akhir dari hubungan ekonomi, hubungan perdagangan banyak mengungkapkan tentang struktur ekonomi-ekonomi yang bersangkutan. Struktur-struktur ekonomi -- perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara negara satu dan lainnya -- itulah yang mempengaruhi tingkat dan pola maupun prospek perdagangan antara negara-negara.

Tulisan ini tidak akan menganalisa akibat-akibat perubahan struktur ekonomi di negara-negara Asia Tenggara terhadap struktur perdagangan mereka. Tetapi tulisan ini akan dibatasi pada beberapa hal yang menarik mengenai pola perdagangan negara-negara itu agar dapat diketahui bidang-bidang mana yang perlu diteliti lebih jauh guna peningkatan kerjasama.

Tabel-tabel 1 dan 2 menunjukkan matriks perdagangan ekspor dan impor antar negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, yang langsung menunjukkan dominasi perdagangan ekspor dan impor dari keenam negara ASEAN. Dari total ekspor di antara ke-10 negara yang berjumlah sekitar US\$ 13,26 milyar pada tahun 1980, sekitar 96,5% merupakan ekspor antar negara-negara ASEAN. Di sektor impor, perdagangan antar negara-negara ASEAN mencapai 96%.

Pada tahun 1980, ekspor dari ASEAN (6) ke ke-4 negara non-ASEAN berjumlah hanya US\$ 284 juta, atau 2,2% dari seluruh ekspor antar negara ASEAN. Demikian juga, impor ASEAN dari ke-4 negara non-ASEAN hanya berjumlah sekitar US\$ 190 juta, atau 1,6% dari total impor antar negara ASEAN. Seperti yang dapat diduga sebelumnya, Singapura memainkan peranan dominan dalam perdagangan antar negara-negara ASEAN (6) dan ke-4 negara non-ASEAN itu. Pada tahun 1980, ekspornya mencapai 57% dari ekspor ASEAN ke negara-negara di kawasan ini, dan 48% dari impor ASEAN dari ke-4 negara non-ASEAN tersebut.

Perlu dicatat bahwa perdagangan antar negara-negara ASEAN saat ini hanya mencapai sekitar 16% dari seluruh perdagangan ASEAN, suatu jumlah yang tidak jauh berbeda dengan tingkatan pada tahun 1974, yaitu 13%. Peningkatan yang lambat dalam perdagangan antar negara-negara ASEAN ini mengundang suatu evaluasi kritis dalam ASEAN sendiri mengenai manfaat dari *Preferential Trading Arrangements* (PTA) yang diperkenalkan tahun 1977. Pada gilirannya hal ini telah membawa suatu konsensus baru di dalam ASEAN, yaitu bahwa perdagangan jangan dijadikan pusat perhatian, tetapi kerjasama hendaknya difokuskan pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan pembangunan industri dan pengembangan sumber-sumber alam bersama, yang pada akhirnya akan direfleksikan dalam struktur perdagangan ASEAN. Usaha-usaha dalam bidang-bidang ini menghendaki adanya perubahan-perubahan struktural dan penyesuaian-penyesuaian di setiap negara ASEAN. Tugas-tugas ini tampaknya menjadi fokus program ASEAN sekarang ini.

Perdagangan Vietnam dengan negara-negara ASEAN meliputi sekitar 10% dari total perdagangan, dan pada dasarnya pola perdagangan Vietnam tidak jauh berbeda dengan pola perdagangan negara-negara ASEAN dalam arti bahwa perdagangan dengan negara-negara maju lebih dominan daripada

Tabel 1

Matriks Ekspor Intra-Regional Tahun 1980 (dalam jutaan US\$)

Ekspor ke dari	Brunei	Indonesia	Malaysia	Pilipina	Singapura	Thailand	ASEAN (6)	Birma	Kampuchea	Laos	Vietnam	Asia Tenggara (10)
Brunei	—		1	54	180	197	432	--	—	—	—	432
Indonesia	—	—	60	181	2.484	35	2.760	1	—	—	—	2.761
Malaysia	23	34	—	198	2.480	188	2.924	20	—	—	—	2.944
Pilipina	3	107	94	—	113	63	380	—	3	•	6	389
Singapura	277	(936)	2.908	273	—	844	5.238	67	27	19	49	5.400
Thailand	9	237	292	24	503	—	1.065	3	32	45	12	1.157
ASEAN (6)	312	1.314	3.355	730	5.760	1.327	12.799	91	62	64	67	13.083
Birma	•	46	30		63	10	149	—	—	—	—	149
Kampuchea	—	—	—	—	(2)		2	—	—	—	—	2
Laos	—	•	1	—	2	2	5	—	—	—	—	5
Vietnam	—	•	•	—	16	1	17	—	—	—	--	18
Asia Tenggara (10)	312	1.360	3.386	730	5.843	1.340	12.972	91	63	64	67	13.257

Catatan: Angka dalam kurung merupakan data yang dilaporkan oleh partner dagangnya.

Sumber: IMF, *Direction of Trade Statistics*, 1982 Yearbook.

Tabel 2

Matriks Impor Intra-Regional Tahun 1980 (dalam jutaan US\$)

Impor dari ke	Brunei	Indonesia	Malaysia	Pilipina	Singapura	Thailand	ASEAN (6)	Birma	Kampuchea	Laos	Vietnam	Asia Tenggara (10)
Brunei	—	•	26	4	305	10	345	—	—	—	—	345
Indonesia	—	—	36	90	936	288	1.350	50	—	—	—	1.400
Malaysia	1	81	—	107	1.265	320	1.774	32	—	1	—	1.807
Pilipina	60	194	162	—	133	22	571	—	—	—	—	571
Singapura	199	(2.484)	3.323	75	—	475	6.556	70	2	2	18	6.648
Thailand	217	45	166	78	599	—	1.105	11	—	2	1	1.119
ASEAN (6)	477	2.804	3.713	354	3.238	1.115	11.701	164	2	5	19	11.890
Birma	—	1	22	•	74	3	100	—	—	—	—	100
Kampuchea	—	—	—	(3)	(27)	(32)	62	—	—	—	—	62
Laos	—	•	—	•	20	49	69	—	—	—	1	70
Vietnam	—	—	•	7	54	14	75	—	—	7	—	82
Asia Tenggara (10)	477	2.805	3.735	364	3.413	1.215	12.007	164	2	12	20	12.204

Catatan: Angka dalam kurung merupakan data yang dilaporkan oleh partner dagangnya.

Sumber: IMF, *Direction of Trade Statistics*, 1982 Yearbook.

perdagangan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Demikian pula, perdagangan Vietnam dengan negara-negara Pasifik Barat -- dengan negara-negara sedang berkembang dan negara-negara maju -- berjumlah lebih dari separuh dari total perdagangannya, suatu hal yang juga ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN lain. Persamaan ini juga dapat dilihat pada Birma dan Laos. Namun pada tahun 1981 impor Laos dari negara-negara ASEAN mencapai jumlah 51% dari seluruh impornya, dan lebih dari sepertiga ekspor Birma ditujukan ke negara-negara ASEAN. Tidak ada data lengkap mengenai perdagangan Kampuchea. Pada tahun 1981 tampaknya sekitar 96% dari impornya berasal dari Uni Soviet, tetapi hanya 7% dari ekspornya ditujukan ke Uni Soviet. Adalah mungkin bahwa sebagian ekspor Kampuchea ditujukan ke negara-negara Pasifik Barat.¹

Pola khusus dari arah perdagangan (*trade direction*) seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk sebagian besar berhubungan dengan jenis barang yang diperdagangkan. Impor barang-barang industri mendominasi impor negara-negara Asia Tenggara, suatu gambaran yang demikian umum di antara kebanyakan negara sedang berkembang. Karena banyak dari perdagangan itu adalah dalam barang-barang industri, khususnya barang-barang modal, negara-negara sedang berkembang harus bersaing dengan impor dari negara-negara maju.

Jumlah impor barang-barang industri di negara-negara Asia Tenggara relatif tinggi. Tahun 1979 jumlah itu mencapai lebih dari 70% dari total impor Brunei dan Birma, antara 50% dan 60% dari seluruh impor Singapura, Laos, Kampuchea, Indonesia dan Malaysia, dan antara 45-50% dari seluruh impor Pilipina dan Muangthai. Impor bahan bakar mineral menduduki tempat kedua terbesar dari impor Muangthai, Singapura dan Pilipina, sedangkan untuk Laos dan Kampuchea tempat kedua diduduki oleh impor bahan makanan.

Di bidang ekspor, tampak gambaran yang lebih beraneka-ragam. Ekspor makanan mendominasi perdagangan Muangthai dan Birma. Bahan bakar mineral mendominasi ekspor Brunei dan Indonesia. Saham bahan-bahan mentah (tidak termasuk bahan bakar) merupakan yang tertinggi dari ekspor Malaysia, Pilipina, Kampuchea (1972) dan Laos (1974). Singapura merupakan satu-satunya negara di kawasan ini dengan saham ekspor barang-barang industri yang terbesar. Hal ini kiranya menerangkan mengapa Singapura memainkan peranan penting dalam perdagangan baik antar negara-negara ASEAN maupun antara ASEAN dan keempat negara non-ASEAN. Perdagangan Muangthai dengan kedua tetangga dekatnya, yaitu Laos dan Kampuchea, juga cukup penting.²

¹Penjelasan ini berasal dari IMF, *Direction of Trade Statistics*, 1982 Yearbook.

²Informasi yang paling baru mengenai struktur-struktur perdagangan dapat diperoleh di ESCAP, *Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 1981*.

Tinjauan mengenai hubungan perdagangan di atas dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dari setiap negara-negara Asia Tenggara, dan dapat pula menunjukkan bidang-bidang mana yang cukup potensial untuk peningkatan kerjasama ekonomi. Peningkatan dalam perdagangan dapat dicapai melalui pengenalan yang lebih baik dari pasar-pasar dan dengan membentuk suatu mekanisme perdagangannya, tetapi pada umumnya usaha ini mungkin hanya mengakibatkan peralihan perdagangan (*trade diversion*) dan bukan penciptaan perdagangan (*trade creation*) yang seharusnya menjadi sasaran. Penciptaan perdagangan dapat dicapai melalui kerjasama dalam pengembangan pertanian, sumber-sumber alam, dan khususnya sektor industri. Telah dibuktikan bahwa negara-negara yang berhasil meningkatkan pembangunan, khususnya di sektor industri, akan memperoleh kesempatan-kesempatan yang lebih besar untuk melakukan perdagangan internasional dan dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui efisiensi yang lebih besar dalam produksi dan konsumsi, suatu dalil yang dipegang teguh oleh para teoretisi dalam bidang perdagangan internasional.